

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku/Monografi Hukum

Abu Daud Busroh. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Ghalia Indonesia, cetakan pertama. Jakarta. 1983.

-----. *Ilmu Negara*. Bumi Akasara, cetakan kelima belas. Jakarta. 2019.

Ahmad Redi. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Sinar Grafika, cetakan ketiga. Jakarta. 2022.

Ani Sri Rahayu. *Pengantar Pemerintahan Daerah*. Sinar Grafika, cetakan pertama, Jakarta, 2018.

Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. Mandar Maju, cetakan pertama, Bandung, 2008.

-----. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju, cetakan kelima. Bandung. 2018.

C.S.T. Kansil, Christine ST Kansil. *Pemerintahan Daerah di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah*. Sinar Grafika, cetakan ketiga. Jakarta. 2008.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, *Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2022.

Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi. *Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, cetakan ketiga. Jakarta. 2018.

Eka NAM Sihombing. *Ilmu Perundang-Undangan*. Setara Press, cetakan pertama. Malang. 2021.

-----. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Setara Press, cetakan pertama. Malang. 2020.

Hyronimus Rhiti. *Hukum Progresif dan Postmodernisme*. GENTA Publishing, cetakan pertama. Yogyakarta. 2020.

Inu Kencana Syafie. *Ilmu Pemerintahan*. Bumi Akasara, cetakan ketiga. Jakarta. 2015.

- Irfan Fachruddin. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Alumni, cetakan pertama. Bandung. 2004.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media, cetakan keempat. Yogyakarta. 2021.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusialisme Indonesia*. Sinar Grafika, cetakan kelima. Jakarta. 2018.
- . *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. Konstitusi Press (Konpress), cetakan keempat. Jakarta. 2021.
- . *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Sinar Grafika, cetakan pertama. Jakarta. 2015.
- . *Teori Hierarki Norma Hukum*. Konstitusi Press (Konpress), cetakan kedua. Jakarta. 2021.
- . *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta. 2006.
- JJ.H. Bruggink. *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*. Citra Aditya Bakti, cetakan keempat. Bandung. 2015.
- Komisi III DPR RI. *Selayang Pandang Komisi III DPR RI (Evaluasi Penegakan Hukum di Indonesia 2014-2019)*. Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2019.
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Kanisius, cetakan kedua puluh empat. Yogyakarta. 2022.
- Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Indonesia*. edisi kedua cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Ni'matul Huda. *Ilmu Negara*. Rajawali Pers, cetakan kesepuluh. Depok. 2018.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenadamedia Group, cetakan kesepuluh. Jakarta. 2015.
- . *Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*. Kencana, cetakan ketiga belas. Jakarta. 2021.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introduction to Indonesian Administrative Law*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.

R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, cetakan kedua puluh dua. Jakarta. 2021.

Rio Christiawan. *Omnibus Law: Teori dan Penerapannya*. Sinar Grafika, cetakan pertama. Jakarta. 2021.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, cetakan ketiga. Jakarta. 1986.

Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty Yogyakarta, cetakan keenam. Yogyakarta. 2009.

Zainal Arifin Mochtar; Eddy OS Hiariej. "*Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*". Red & White Publishing, cetakan pertama, Indonesia, 2021.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

b. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015.

Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016.

Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

c. Jurnal, Karya Tulis dan Artikel Hukum

Deni Nuryadi. “Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya di Indonesia”, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa, Karawang. 2016.

Helmi. “Penataan Peraturan Daerah Dengan Metode Omnibus Law: Urgensi dan Mekanisme”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2021): 441-472, DOI: 10.22437/ujh.4.2.441-472.

Ibnu. “Deregulasi Adalah: Pengertian, Alasan, Kelebihan dan Kekurangan Deregulasi”, Accurate.id, <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/deregulasi-adalah/>.

Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area. “Apa Itu Teori Hukum Stufenbau”. Medan, 2022.

Muliyawan. “Paradigma Hukum Progresif”, Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo. Sulawesi Selatan, 2021.

MYS, “Menggali Karakter Hukum Progresif”. Hukumonline.com. Laman situs: <https://www.hukumonline.com/>. Semarang. 2013.

Philipus M. Hadjon, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat: Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara”. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Rilo Pambudi S. “Teori Hukum Berjenjang Dalam Perspektif Hans Kelsen dan Hans Nawiasky”, Juridische, 2019.

**Robert Na Endi Jaweng. “Sesudah Perda Batal, Lalu Apa”, KPPOD (Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah), 2016.**

Sadu Wasistiono. “Perkembangan Pemikiran Teori Desentralisasi (*Thought of Decentralization Theories*), Modul, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Satyagama Jakarta, Jakarta, 2012.

Taufik H. Simatupang. “Mendudukan Konsep *Executive Review* Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Balitbang Hukum dan HAM, Jakarta, 2019.

Viona Wijaya. “Perubahan Paradigma Penataan Regulasi di Indonesia”, Jurnal Rechtsvinding, Volume 10 Nomor 2, Agustus 2021.

d. Laman/Situs Resmi

CNBC Indonesia. “Jokowi Minta Regulasi Dipangkas”. Tautan berita: <https://www.youtube.com/watch?v=aoRGoqa4cgY&t=4s>.

CNN Indonesia, “Bergerak Cepat, Jokowi Cabut Ribuan Perda Bermasalah”, 2016. Tautan berita: <https://www.youtube.com/watch?v=Q1NQgMwx2W0>.

Gramedia.com, Anendya Niervana, “Deregulasi: Pengertian, Tujuan, Aturan, Prinsip, Implikasi”, <https://www.gramedia.com/literasi/deregulasi/>.

Hukumonline.com, “Makna Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara”, Muhammad Yasin. Hukumonline, 2017.

-----, “Menggali Karakter Hukum Progresif”, Semarang, 2013.

-----, “*Civil Law* dan *Common Law*, Bernadetha Aurelia Oktavira, Temukan Bedanya di Sini”.

-----, “Terindikasi Fraud, Bank Dunia Stop Lanjutkan Survei EoDB”, Mochamad Januar Rizki, 2021.

Kementerian Investasi Republik Indonesia, “Indonesia telah menunjukkan prestasi yang progresif di tahun-tahun sebelumnya”, 2021. Tautan artikel: <https://www.investindonesia.go.id/id/why-invest/ease-of-doing-business>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online.

**Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta**, Ahmad Redi, dalam “Rakor Kebutuhan Hukum Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah”, 31 Maret 2022.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, Muliawan, “Paradigma Hukum Progresif”, Sulawesi Selatan, 2021.

Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, “Apa Itu Teori Hukum Stufenbau”, <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-teori-hukum-stufenbau/>, Medan, 2022, diakses pada 30 Januari 2023.

Sekretariat Presiden Republik Indonesia. Tautan berita dalam situs resmi: <https://youtu.be/4m2iiJoZEWA>. 2019. Diakses pada Desember 2022.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Kemendagri Resmi Umumkan 3.143 Perda yang Dibatalkan”, 2016. Link berita: <https://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan/>. Diakses pada Desember 2022.

Wikipedia Ensiklopedia Bahasa Indonesia.